



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Analisis Kritis Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pulau Sumatera

Putri Alia Dewi^{*1}, Herlina Muzanah Zain¹

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Email Corresponding: putrialiadewi535@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 20 Februari 2026

Revised date: 14 Mei 2026

Accepted date: 30 Mei 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i1.5676>

ABSTRACT

The Sumatra region is at high risk for natural disasters, so the government plays a crucial role in managing disaster-related communication. This study aims to deeply analyze how the government regulates disaster management communication in the Sumatra region as part of discourse practice, as well as its impact on the power relationship between the state and society. Using a qualitative approach based on Critical Discourse (CDA), developed by Fairclough, the study focuses on discourse practices and social-political aspects. Data for the study were collected from official government communication materials presented during DPR meetings, press conferences, media outlets, and official state social media from 2025 to 2026. The findings of this study indicate that government's communication is not only for disseminating technical information about disasters, but also for shaping meaning and legitimizing policies. Throughout every stage of a disaster including the pre-disaster, emergency response, and recovery phases, the government acts as the dominant entity in controlling and disseminating discourse with technocratic, heroic, and developmental narratives, these communication practices tend to be one-sided, limiting the opportunity for affected communities to participate.

Keywords: *Government Communication, Natural Disaster, Sumatra Island, Critical Discourse Analysis, Power Relations*



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAKSI

Pulau Sumatera area yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam, sehingga peran pemerintah dalam pengelolaan komunikasi terkait bencana menjadi sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam menganalisis bagaimana pemerintah mengatur komunikasi dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera sebagai bagian praktik wacana, serta dampaknya terhadap hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, dengan menitikberatkan pada praktik wacana dan aspek sosial-politik. Sumber data penelitian berasal dari materi komunikasi resmi pemerintah yang disampaikan melalui pertemuan DPR, konferensi pers, media massa, dan media sosial resmi negara selama tahun 2025-2026. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa komunikasi pemerintah tidak sekadar berfungsi menyampaikan informasi teknis mengenai bencana, tetapi sebagai alat untuk membentuk makna dan memberikan legitimasi pada kebijakan. Dalam setiap tahap bencana sebelum bencana, masa tanggap darurat, dan fase pemulihan negara berperan sebagai pihak yang dominan dalam mengendalikan produksi serta penyebaran wacana melalui narasi yang bersifat teknokratis, heroik, dan pembangunan. Praktik komunikasi cenderung bersifat satu arah dan membatasi kesempatan masyarakat yang terdampak untuk berpartisipasi.

Kata Kunci: *Komunikasi Pemerintah, Bencana Alam, Pulau Sumatera, Analisis Wacana Kritis, Relasi Kuasa.*

PENDAHULUAN

Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, dan banjir. Kerentanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi geografis dan geologis, tetapi juga dengan kapasitas institusional negara dalam mengelola risiko dan krisis kebencanaan. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintah menjadi instrumen strategis karena berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk meringkai situasi bencana, mengoordinasikan respons, serta membentuk persepsi publik terhadap peran dan tanggung jawab negara.

Dalam konteks kebencanaan, komunikasi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi teknis, tetapi juga sebagai mekanisme produksi makna yang membentuk cara publik memahami bencana, tanggung jawab negara, serta legitimasi kebijakan penanganan krisis. Fairclough (2010) menegaskan bahwa bahasa dan komunikasi merupakan praktik sosial yang selalu terikat pada relasi kuasa dan kepentingan institusional tertentu. Dengan demikian, komunikasi pemerintah dalam situasi bencana tidak dapat dipandang sebagai medium netral, melainkan sebagai arena diskursif yang berperan dalam meringkai realitas sosial dan politik.

Penelitian ini juga bertumpu pada pemikiran Michel Foucault mengenai hubungan antara wacana dan kekuasaan. Foucault (1972) memandang wacana bukan sekadar bahasa atau teks, melainkan praktik yang secara sistematis membentuk objek, subjek, dan pengetahuan. Dalam konteks kebencanaan, wacana pemerintah berfungsi menentukan apa yang dianggap sebagai “masalah”, siapa yang berwenang berbicara, dan solusi apa yang dinilai sah. Melalui konsep *power/knowledge*, Foucault menjelaskan bahwa produksi pengetahuan oleh negara termasuk narasi kebencanaan selalu terkait dengan mekanisme kekuasaan. Ketika pemerintah mendefinisikan bencana sebagai fenomena alam ekstrem, anomali iklim global, atau kondisi darurat nasional, negara tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi sekaligus meringkai cara publik memahami penyebab, tanggung jawab, dan solusi yang dianggap sah.

Dengan demikian, komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana dapat dipahami sebagai arena produksi kebenaran (*regime of truth*) yang meringkai peran negara dan masyarakat. Dalam konteks kebencanaan, data dan pernyataan resmi dari lembaga negara seperti BNPB, BMKG, maupun pejabat tinggi negara berfungsi sebagai kebenaran institusional yang memiliki legitimasi tinggi dan jarang dipertanyakan. Produksi kebenaran tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi kebencanaan menjadi arena strategis bagi negara untuk mempertahankan otoritasnya dalam mendefinisikan situasi krisis.

Kerangka utama penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model Norman Fairclough. Fairclough (1995) memandang wacana sebagai praktik sosial yang memiliki tiga dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada praktik wacana dan praktik sosial politik, dalam mereproduksi relasi kuasa melalui narasi teknokratis, heroik, dan pembangunan sejalan dengan tujuan untuk mengkaji relasi kuasa dan legitimasi kebijakan dalam komunikasi pemerintah. Proses ini dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni diskursif, yaitu ketika narasi negara diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak terbantahkan.

Fairclough menegaskan bahwa wacana institusional, termasuk komunikasi negara, berperan penting dalam mereproduksi dominasi dan hegemoni melalui bahasa yang tampak netral dan teknokratis. Oleh karena itu, CDA relevan untuk mengungkap bagaimana komunikasi kebencanaan pemerintah meringkai bencana sebagai persoalan teknis administratif sekaligus menegaskan posisi negara sebagai aktor utama penentu kebijakan.

Untuk memperkuat analisis legitimasi komunikasi pemerintah, penelitian ini juga merujuk pada konsep ruang publik dari Jürgen Habermas. Menurut Habermas, ruang publik merupakan “*a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed*” (Habermas, 1989, p. 102). Namun, dalam perkembangan modern, ruang publik mengalami transformasi menjadi arena legitimasi kekuasaan, bukan lagi ruang debat kritis (Habermas, 1989, p. 201). Habermas memandang ruang publik ideal sebagai arena deliberatif, tempat warga dan negara berdiskusi secara rasional dan setara untuk membentuk opini publik. Namun, dalam masyarakat modern, ruang publik kerap mengalami transformasi menjadi arena legitimasi kekuasaan. Dalam konteks kebencanaan, komunikasi pemerintah yang didominasi konferensi pers satu arah, siaran resmi, dan unggahan media sosial menunjukkan kecenderungan komunikasi strategis yang bertujuan mengamankan dukungan publik terhadap kebijakan, bukan membuka ruang deliberasi yang partisipatif.

Dalam konteks kebencanaan, komunikasi pemerintah yang bersifat satu arah dan minim dialog berpotensi menggeser ruang publik dari arena diskusi menjadi ruang legitimasi kebijakan semata. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi kebencanaan masih dikuasai oleh mode komunikasi yang bersifat top-down, di mana pemerintah menjadi aktor sentral dalam menetapkan narasi dan arah informasi kepada masyarakat. Dalam kondisi krisis, pola komunikasi yang kurang dialog berisiko mengurangi keterlibatan masyarakat yang terdampak dalam menyampaikan pengalaman, kebutuhan, serta kritik terhadap pemerintah. Sebagai akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi tempat diskusi justru lebih banyak berperan sebagai sarana melegitimasi kebijakan pemerintah. Karena itu, komunikasi pemerintah dalam menghadapi bencana tidak hanya perlu dilihat sebagai proses pengiriman informasi, tetapi juga sebagai praktik sosial dan politik yang berhubungan dengan relasi kekuasaan, penciptaan opini publik, dan legitimasi kebijakan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berorientasi pada analisis komunikasi pemerintah dalam mengatasi bencana alam di pulau Sumatera yang dibangun secara diskursif serta dampaknya terhadap hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis wacana komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera, dengan menelaah konstruksi narasi dan relasi kuasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi bencana berbasis wacana kritis serta rekomendasi praktis bagi perbaikan komunikasi kebencanaan yang lebih inklusif dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, dengan fokus pada dua dimensi utama, yaitu praktik wacana (*discourse practice*) dan praktik sosial politik (*social practice*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis komunikasi pemerintah tidak hanya sebagai proses linguistik, tetapi sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan kekuasaan, ideologi, dan legitimasi kebijakan dalam konteks penanganan bencana alam.

Berbeda dengan analisis linguistik mikro, penelitian ini tidak memfokuskan kajian pada struktur bahasa teks secara rinci, melainkan pada konteks produksi, distribusi, dan konsumsi wacana, serta bagaimana wacana tersebut beroperasi dalam struktur politik dan birokrasi negara. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari materi komunikasi resmi pemerintah terkait penanganan bencana alam di Pulau Sumatera. Data dikumpulkan dari media massa nasional dan kanal digital resmi negara selama periode 2025–2026, yang meliputi:

1. Siaran rapat dan forum resmi negara, antara lain: Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas terkait penanganan bencana di Sumatera (Kompas TV, 1 Desember 2025).

2. Konferensi pers dan pernyataan resmi pemerintah, meliputi: Konferensi pers Sekretariat Kabinet mengenai penanganan awal bencana (Kompas.com/YouTube, 19 Desember 2025). Pernyataan resmi BNPB mengenai perkembangan penanganan pascabencana (BeritaSatu/YouTube, 27 Desember 2025).
3. Pernyataan Presiden dan pejabat tinggi negara, yang disampaikan melalui: Media sosial resmi (*Reels Instagram*) terkait kebijakan bantuan dan pemulihan (8 Desember 2025). Pemberitaan media daring dan siaran *YouTube* mengenai pembangunan hunian dan rehabilitasi wilayah terdampak (Tribun Kaltim, 16 Desember 2025).
4. Rapat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, seperti: Rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (CNN Indonesia/YouTube, 26 Januari 2026).

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: Mengidentifikasi aktor utama yang memproduksi wacana kebencanaan, seperti kementerian/lembaga negara, pejabat publik, serta konteks institusional di mana wacana tersebut diproduksi; Menganalisis bagaimana wacana kebencanaan diproduksi, disirkulasikan, dan dikonsumsi melalui berbagai media komunikasi (rapat resmi, konferensi pers, media daring, dan media sosial). Fokus analisis diarahkan pada pola pengulangan narasi tertentu dalam setiap fase penanganan bencana (pra-bencana, tanggap darurat, dan pemulihan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan diawali dengan pemetaan bentuk-bentuk komunikasi pemerintah sebagai praktik wacana negara, yang meliputi aktor komunikasi, jenis pesan, dan saluran komunikasi. Selanjutnya, analisis diperdalam dengan mengkaji bagaimana praktik wacana tersebut beroperasi pada setiap fase kebencanaan dan praktik sosial politik yang lebih luas.

a. Aktor Komunikasi

Pada fase tanggap darurat, peran komunikator utama dijalankan oleh Sekretaris Kabinet, yang berfungsi sebagai juru bicara pemerintah melalui konferensi pers resmi. Dalam kapasitas ini, Sekretaris Kabinet menyampaikan informasi mengenai mobilisasi nasional, pengerahan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan, yang meringkaskan respons negara sebagai cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sementara itu, BNPB berperan sebagai aktor teknokratis yang menyuplai data resmi terkait jumlah korban, pengungsi, distribusi logistik, serta skema bantuan hunian sementara dan dana tunggu hunian. BMKG dan Basarnas menempati posisi penting pada fase pra-bencana dan tanggap darurat melalui penyampaian peringatan dini, penjelasan penyebab bencana, serta pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Aktor lain seperti Menko PMK, Mendagri, dan menteri teknis berfungsi sebagai aktor pendukung dalam koordinasi lintas sektor, terutama pada fase pemulihan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah pusat menjadi aktor dominan dalam praktik komunikasi kebencanaan di Pulau Sumatera. Presiden Prabowo Subianto tampil sebagai komunikator kunci, khususnya pada fase revitalisasi dan pemulihan, melalui penyampaian kebijakan strategis seperti penetapan bantuan perumahan sebesar Rp60 juta per rumah, pembangunan sekitar 2.000 unit hunian, penyaluran dana rehabilitasi ke daerah, serta pemanfaatan lahan negara untuk relokasi korban.

Temuan itu mengindikasikan bahwa negara memiliki peran utama dalam produksi dan penyaluran informasi bencana. Keadaan ini sejalan dengan pendapat Fairclough (1995) yang menyebutkan bahwa praktik wacana institusional berperan dalam mereproduksi hubungan kekuasaan melalui pengendalian atas narasi

dan otoritas komunikasi. Dominasi aktor negara dalam studi ini menunjukkan bahwa komunikasi bencana tidak sepenuhnya bersifat partisipatif, tetapi masih terfokus pada institusi negara sebagai pemegang legitimasi yang utama.

b. Pesan Komunikasi

Dari sisi jenis pesan, komunikasi pemerintah menunjukkan pergeseran yang jelas sesuai dengan fase kebencanaan. Pada fase pra-bencana, pesan bersifat informatif dan edukatif, terutama terkait peringatan dini cuaca ekstrem, potensi siklon tropis, serta imbauan kesiapsiagaan kepada masyarakat. Pesan-pesan ini cenderung teknokratis dan berbasis data ilmiah yang diproduksi oleh lembaga teknis negara.

Memasuki fase tanggap darurat, pesan pemerintah berubah menjadi pesan operasional dan persuasif. Fokus utama diarahkan pada evakuasi korban, distribusi logistik, pengerahan personel, serta ajakan gotong royong dan solidaritas nasional. Dalam fase ini, bahasa yang digunakan menekankan urgensi, kehadiran negara, dan semangat kolektif menghadapi krisis.

Dalam video *youtube* yang di unggah BeritaSatu (2025) Abdul Muhari Kapusdatin BNPB menyatakan bahwa “artinya kita makin dekat dengan target-target yang sudah ditetapkan dan semua masih berjalan sesuai dengan perencanaan dan kita harapkan memang di akhir Desember ini untuk Sektor Infrastruktur Perhubungan ini sudah selesai” (10:30).



Gambar. 1

Pada fase revitalisasi dan pemulihan, pesan pemerintah bergeser menjadi pesan kebijakan dan pembangunan. Komunikasi difokuskan pada alokasi anggaran, pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, serta narasi bahwa kondisi daerah terdampak mulai berangsur normal. Pesan-pesan ini berfungsi untuk menandai transisi dari kondisi darurat menuju normalisasi pascabencana.

Perubahan bentuk pesan pada setiap fase bencana menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah bersifat strategis dan menyesuaikan kebutuhan legitimasi negara dalam situasi krisis. Temuan ini mendukung konsep *power/knowledge* Foucault (1980), yang menjelaskan bahwa produksi pengetahuan melalui data, angka korban, maupun laporan resmi merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan negara dalam membentuk pemahaman publik mengenai bencana.

c. Saluran Komunikasi

Analisis juga menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyebarkan wacana kebencanaan. Media arus utama seperti Kompas TV dan Tribun Kaltim digunakan untuk menyampaikan informasi formal dan resmi, termasuk siaran langsung rapat koordinasi dan rapat DPR.

Konferensi pers menjadi medium komunikasi satu arah yang terstruktur, terutama pada fase tanggap darurat, dengan tujuan memastikan keseragaman informasi.

Selain media konvensional, pemerintah juga memanfaatkan media sosial, khususnya *Instagram*, melalui unggahan reels akun resmi seperti Infokrw. Presiden menggunakan kanal ini untuk menyampaikan pesan kebijakan pemulihan secara lebih ringkas dan personal, menunjukkan adaptasi negara terhadap logika komunikasi digital dan upaya menjangkau publik yang lebih luas.

Di sisi lain, penggunaan media sosial, khususnya *Instagram*, menunjukkan adaptasi negara terhadap logika komunikasi digital. Presiden dan lembaga pemerintah memanfaatkan unggahan singkat dan visual untuk menyampaikan kebijakan pemulihan secara lebih personal. Namun, meskipun medium berubah, kontrol atas produksi dan distribusi wacana tetap berada di tangan aktor negara, sehingga ruang dialog dan partisipasi publik tetap terbatas.

Pemanfaatan media massa dan media sosial menunjukkan adanya adaptasi pemerintah terhadap perkembangan komunikasi digital. Namun, meskipun media yang digunakan semakin beragam, pola komunikasi yang berlangsung masih cenderung satu arah. Dalam perspektif Habermas (1989), kondisi ini menunjukkan komunikasi negara yang lebih bersifat legitimatif daripada deliberatif.

Berdasarkan pemetaan aktor, jenis pesan, dan saluran komunikasi tersebut, analisis selanjutnya difokuskan pada praktik wacana negara yang diproduksi dan diedarkan melalui media arus utama serta kanal digital resmi pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pemulihan. Sumber data mencakup rapat DPR, konferensi pers, siaran media, serta pernyataan Presiden, yang dianalisis sebagai representasi praktik komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera.

Komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera tidak dapat dipahami semata sebagai proses penyampaian informasi, melainkan sebagai praktik wacana yang berlangsung dalam struktur sosial dan politik tertentu. Praktik komunikasi ini melibatkan aktor negara, perangkat birokrasi, media, serta masyarakat terdampak, yang saling berinteraksi dalam relasi kuasa yang tidak selalu setara. Dalam konteks tersebut, pesan-pesan kebencanaan pemerintah tidak hanya menginformasikan situasi krisis, tetapi juga membingkai realitas bencana, mengatur pola koordinasi, serta membangun legitimasi atas kebijakan dan tindakan negara.

Produksi data meteorologis, laporan audit, dan statistik korban menunjukkan bagaimana negara memonopoli produksi pengetahuan kebencanaan. Dalam kerangka *power/knowledge* Foucault, pengetahuan ilmiah yang diproduksi lembaga teknis tidak berdiri netral, melainkan berfungsi memperkuat otoritas negara dalam mendefinisikan sebab dan solusi bencana. Ketika bencana dijelaskan sebagai akibat fenomena global atau faktor alamiah, maka tanggung jawab struktural negara menjadi kurang terlihat. Dengan demikian, pengetahuan teknokratis berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang mengatur cara publik memahami realitas krisis.

Komunikasi kebencanaan membentuk suatu *regime of truth* di mana pernyataan resmi pemerintah menjadi sumber kebenaran utama yang jarang dipertanyakan. Data korban, angka bantuan, dan progres pembangunan yang disampaikan melalui konferensi pers dan media arus utama membentuk standar kebenaran yang sah secara institusional. Dalam rezim ini, kebenaran tidak muncul dari dialog publik, melainkan dari otoritas birokrasi. Akibatnya, pengalaman warga terdampak yang mungkin berbeda atau kritis terhadap kebijakan negara tidak memperoleh legitimasi yang setara dalam ruang publik.

Selanjutnya, pembahasan akan menguraikan bagaimana praktik wacana tersebut beroperasi pada setiap fase kebencanaan dan praktik sosial politik yang lebih luas.

a. Fase Pra Bencana

Pada fase pra-bencana, praktik wacana negara ditandai oleh dominasi narasi teknokratis yang diproduksi oleh lembaga negara seperti BMKG dan Basarnas dalam forum formal kenegaraan. Hal ini terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI yang disiarkan Kompas TV, di mana temuan BPK RI dijadikan rujukan utama untuk membingkai persoalan kebencanaan sebagai masalah efektivitas sistem peringatan dini, tata kelola informasi, dan kapasitas kelembagaan (Kompas TV, 1 Desember 2025).

Dalam video youtube yang di unggah tvOneNews (2025) Riandra Purba Walhi Sumatera Utara menyatakan bahwa “sudah disampaikan kepada beberapa kementerian kehutanan, kementerian antar bpn dan kementerian lingkungan kehidupan dan presiden semenjak 10 tahun terakhir terkait bahaya bencana. Namun pemerintah masih mengabaikan karena perusahaan punya izin lingkungan” (5:10)



Gambar. 2

Dalam rapat Kabinet Paripurna video *youtube* yang di unggah kompas.com (2025) Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa “ada yang teriak bencana nasional, situasi sumatera terkendali. Pemerintah akan membuat tim satgas khusus untuk mengatasi situasi bencana di sumatera terkait pembangunan hunian untuk korban yang terdampak” (1:37)



Gambar. 3

Dalam forum tersebut, BMKG menekankan faktor eksternal seperti fenomena siklon tropis dan anomali iklim global sebagai penyebab utama bencana di Sumatera. Praktik wacana ini membangun legitimasi ilmiah negara sekaligus menggeser fokus dari tanggung jawab mitigasi struktural ke ranah alamiah dan global. Pada level praktik wacana (meso), produksi pengetahuan dikontrol oleh lembaga teknis negara, sementara pada level praktik sosial-politik (makro), negara mempertahankan otoritas dalam mendefinisikan risiko dan kesiapsiagaan (Fairclough, 1995).

b. Fase Tanggap Darurat

Pada fase tanggap darurat, praktik wacana mengalami pergeseran menuju narasi kehadiran negara dan mobilisasi nasional. Konferensi pers Sekretariat Kabinet yang menekankan bahwa pemerintah dan warga “berjuang sejak detik pertama” membangun citra negara yang responsif, heroik, dan berkorban tanpa pamrih (Setkab, Kompas.com, 19 Desember 2025).

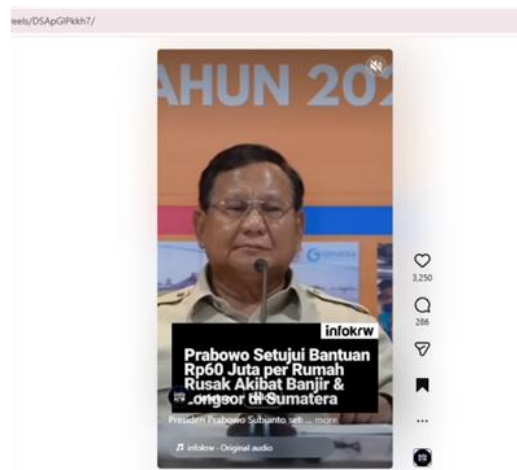


Gambar. 4

Narasi serupa juga diperkuat melalui laporan berkala BNPB yang menampilkan data korban, distribusi logistik, serta pengerahan personel secara masif (BNPB, *YouTube*, 27 Desember 2025). Dalam praktik wacana, penggunaan angka dan capaian operasional berfungsi menegaskan efektivitas negara. Pada level praktik sosial-politik, krisis dimanfaatkan untuk melegitimasi sentralisasi kewenangan dan koordinasi nasional lintas sektor, sebagaimana ditegaskan pula oleh Komisi V DPR RI dalam penekanan terhadap pentingnya “*golden time*” penyelamatan (Kompas TV, 1 Desember 2025).

c. Fase Pemulihan

Memasuki fase pemulihan, praktik wacana negara bergeser ke arah narasi pembangunan dan normalisasi. Pernyataan Presiden mengenai persetujuan bantuan Rp60 juta per rumah rusak dan pembangunan hunian tetap disampaikan melalui media sosial dan kanal berita daring, menandai penggunaan platform digital sebagai sarana legitimasi kebijakan pemulihan (*Instagram @infokrw*; Antara, 8 Desember 2025).



Gambar. 5

Narasi pemulihan ini diperkuat oleh pemberitaan mengenai pembangunan 2.000 rumah dan penyaluran anggaran langsung ke daerah terdampak, yang menempatkan negara sebagai aktor pembangunan yang solutif dan efisien (Tribun Kaltim, YouTube, 16 Desember 2025). Selain itu, rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipimpin Mendagri menegaskan bahwa kondisi “semakin normal” di sebagian besar wilayah terdampak, dengan fokus pada penyelesaian huntara dan perbaikan infrastruktur dasar (YouTube, 26 Januari 2026).

Presiden Republik Indonesia tampil sebagai komunikator kunci, terutama pada fase pemulihan, melalui penyampaian kebijakan strategis terkait bantuan perumahan, pembangunan hunian tetap, penyaluran anggaran rehabilitasi, dan kebijakan relokasi korban. Kehadiran Presiden dalam wacana kebencanaan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga simbolik, menegaskan peran kepala negara sebagai penentu arah kebijakan sekaligus sumber utama legitimasi tindakan negara.

Praktik ini menunjukkan bagaimana wacana pemulihan berfungsi menormalisasi krisis melalui indikator administratif dan target kebijakan. Pada level praktik sosial-politik, pemulihan menjadi arena perluasan intervensi negara dalam pengelolaan ruang, anggaran, dan sumber daya, sementara pengalaman warga terdampak direpresentasikan terutama sebagai objek kebijakan.

Dominasi aktor negara dalam setiap fase menunjukkan bahwa komunikasi kebencanaan tidak membuka ruang yang setara bagi masyarakat terdampak untuk mendefinisikan pengalaman mereka sendiri. Korban direpresentasikan terutama melalui angka, kategori administratif, dan skema bantuan, bukan sebagai subjek yang memiliki narasi alternatif. Dengan demikian, praktik komunikasi ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengatur posisi subjek dalam struktur diskursif: negara sebagai penentu makna, masyarakat sebagai penerima kebijakan.

Berdasarkan analisis komentar publik pada unggahan YouTube terkait bencana di Pulau Sumatera, terlihat bahwa ruang komentar menjadi arena kritik terhadap pemerintah sekaligus produksi makna alternatif mengenai bencana. Sejumlah warganet mempertanyakan respons negara, seperti dalam komentar “*Mana Bantuan Pemerintah??? kok slow mo..*” dan “*Kementerian Kehutanan tidak becus kerja.*” Selain itu, bencana juga dikonstruksi sebagai akibat dari kerusakan lingkungan dan tata kelola kekuasaan, sebagaimana tercermin dalam pernyataan “*Penyebabnya hutan dirusak pejabat serakah*” dan “*Hutan dibabat, tanah dilubangi, sungai dikotori sampah.*” Terdapat pula perdebatan mengenai status bencana nasional yang dinilai sarat pertimbangan politik dan ekonomi, serta keraguan terhadap validitas data resmi seperti dalam komentar “*Data gak sesuai fakta.*” Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap narasi yang diproduksi oleh otoritas.

Di sisi lain, ruang komentar juga memuat ekspresi solidaritas dan empati publik terhadap korban, misalnya “*Turut berduka atas bencana banjir di Sumatera*” dan pengakuan personal seperti “*Perasaan ngerasain banjir 1,5m dirumah aja udah pengen nangis.*” Dengan demikian, komunikasi bencana di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang kontestasi wacana sekaligus pembentukan solidaritas sosial. Publik tidak sekadar menjadi penerima pesan, melainkan turut membangun, mempertanyakan, dan menegosiasikan makna atas peristiwa bencana tersebut.

Secara keseluruhan, komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera beroperasi sebagai praktik wacana yang sarat dengan relasi kuasa. Pada level praktik wacana, negara mengontrol produksi pengetahuan, penentuan narasi, dan saluran komunikasi. Pada level praktik sosial-politik, wacana kebencanaan berfungsi mereproduksi dominasi negara, menormalisasi intervensi birokratis, serta membingkai masyarakat terdampak sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai subjek yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif Habermas, praktik komunikasi ini lebih bersifat legitimatif daripada deliberatif, karena berfungsi mengamankan dukungan publik terhadap kebijakan negara, bukan membuka ruang dialog kritis. Dengan demikian, komunikasi kebencanaan tidak hanya mengelola krisis, tetapi juga mereproduksi dominasi negara dalam struktur sosial dan politik pascabencana.

Results and discussion contain research findings and discussion. Write down the findings obtained from the results of the research that has been carried out and must be supported by adequate data. Research results and findings must be able to answer the research questions or hypotheses in the introduction.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) model Norman Fairclough, komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera terbukti berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyampaian informasi, tetapi sebagai praktik wacana yang mereproduksi relasi kuasa antara negara dan masyarakat. Pada level praktik wacana, negara secara dominan mengontrol produksi, distribusi, dan legitimasi informasi melalui konferensi pers, rapat resmi, media arus utama, serta kanal digital. Narasi yang dibangun bersifat teknokratis, heroik, dan pembangunanistik, yang menampilkan negara sebagai aktor utama penentu arah kebijakan dalam setiap fase kebencanaan.

Secara administratif dan koordinatif, komunikasi pemerintah dapat dinilai efektif karena mampu menjaga stabilitas informasi, membangun citra responsif, serta mengonsolidasikan dukungan publik dalam situasi krisis. Namun, dalam perspektif kritis, praktik komunikasi tersebut cenderung bersifat top-down dan legitimatif. Negara memonopoli produksi pengetahuan kebencanaan melalui data resmi dan pernyataan institusional, yang dalam kerangka *power/knowledge* Michel Foucault menunjukkan bagaimana pengetahuan berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan. Komunikasi kebencanaan membentuk suatu *regime of truth*, di mana narasi resmi menjadi standar kebenaran dominan yang jarang memperoleh tantangan setara dalam ruang publik formal.

Jika ditinjau dari konsep ruang publik deliberatif Jürgen Habermas, komunikasi pemerintah dalam konteks ini lebih bersifat legitimatif daripada dialogis. Masyarakat terdampak lebih banyak direpresentasikan sebagai objek kebijakan melalui angka dan kategori administratif, bukan sebagai subjek yang berpartisipasi aktif dalam pembentukan makna dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara pemerintah berkomunikasi dalam merespons bencana di Pulau Sumatera tergolong efektif secara teknokratis, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip komunikasi yang partisipatif dan demokratis dalam perspektif CDA. Praktik komunikasi kebencanaan masih mereproduksi dominasi diskursif negara dan membatasi ruang negosiasi makna bagi masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Danugroho, A. (2021). Susilo Bambang Yudhoyono's Government Policy in Handling The Aceh Tsunami: a Historical Research. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 6(1), 1-12. <https://governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/151/72>
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). London: Routledge.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). London: Routledge.

- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon Books.
https://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_Power_Knowledge_Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Jati, G. P., & Husein, R. (2019). Discourse analysis of online media on the haze disaster due to forest fires in Jambi, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 81-93.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19365>
- Pinontoan, R. A., Max Rembang, & Eva Marentek. (2018). *Peran Pemerintah Sebagai Komunikator Pembangunan Di Desa Manembo Kecamatan Langowan Selatan*. Retrieved 01 27, 2026. from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/19568/19126>
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). *Jenis Jenis Komunikasi*, 2(3), 33. Retrieved 01 27, 2026, from <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/158/132>
- Sitti Fatimah, & Hafied Cangara. (2016). Pemanfaatan Saluran Komunikasi Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Pusat Pelayanan Informasi Dan Pengaduan (Pindu) Pemerintah Kabupaten Pinrang, 5(1), 80. Retrieved 01 27, 2026, from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1885/0>
- Sosiawan, E. A., Nugroho, A. R. B., & Susilastuti, D. N. (2014). Model manajemen teknologi komunikasi dalam pemerintahan dan penanganan bencana alam. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 147–160.
<https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/304>
- Tarumingkeng, Rudy, C. (2025). Critical Discourse Analysis (CDA) Pengertian, Teori, dan Aplikasi.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/elsya/article/view/3615>
- Pribadi, R., Lustyatie, N., & Zuriyanti. (2024). Menyoal Penelitian Analisis Wacana Kritis di Indonesia: Meninjau Aspek Jenis Penelitian, Subjek Penelitian dan Model Analisis. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/hortatori/article/view/3393/1894>
- Arkania, C., Putri, B. A., et.al. (2025) Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan Banjir Sumatera: Analisis Respon Publik di Media Sosial. *Jurnal Inovasi & Kajian Mutidisipliner Kontemporer*.
<https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/741>
- Official, T. K. (Creator). (2025). *Presiden Prabowo Mulai Bangun 2.000 Rumah untuk Korban Bencana di Sumatera Pekan Ini*. https://youtu.be/iq9eVHZ-Isc?si=s6KgWuMAR_uXMaBR
- BeritaSatu (Creator). (2025). *Breaking News | BNPB Sampaikan Penanganan Terkini Bencana Sumatera*.
https://www.youtube.com/live/3w_sJv1mjYg?si=nJJVZv8SxkTtkphR
- CNN Indonesia (Creator). (2025). *LIVE Hasil Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar*.
<https://www.youtube.com/live/aU1o8Yi7bCs?si=kWUYGcccmw2lSZTG>
- infokrw (Creator). (2025). *Prabowo Setujui Bantuan Rp60 Juta per Rumah Rusak Akibat Banjir & Longsor di Sumatera* [Instagram]. <https://www.instagram.com/reels/DSApGIPkhh7/>
- Kompas. com (Creator). (2025). *Setkab Teddy: Sejak Detik Pertama, Pemerintah-Warga Berjuang Keras!*.
<https://youtu.be/fKIT4e654Lw?si=T2-626FmLw8uCu-X>
- Kompas. TV (Creator). (2025). *BREAKING NEWS - Kabasarnas dan Kepala BMKG Paparkan Penanganan Bencana Sumatera di Komisi V DPR*.
https://www.youtube.com/live/v9_fOWCyF_A?si=TIkLvKl4yj_NBv1c

- tvOneNews (Creator). (2025). *Walhi: Kami Sudah Peringatkan Pemerintah Soal Ancaman Bencana Akibat Eksploitasi Lahan* | AKIP <https://youtu.be/fYt4YTVNtPY?si=ADKavLKPvVOVq-eb>
- Kompas. com (Creator). (2025). *Presiden: Ada Yang Teriak Bencana Nasional, Situasi Sumatera Terkendali* <https://youtu.be/lh9whdfjGSs?si=YJv-TaWmr7UKlQG5>